

SKRIPSI

INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA

KORUPSI



Diajukan Oleh :

MULIA PARLINDUNGAN

NPM : 08 05 09937

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

MULIA PARLINDUNGAN

NPM : 08 05 09937
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 27 Agustus 2013
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Prasetyo Sidi Purnomo', is written over a horizontal line.

(P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

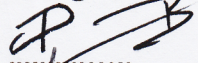

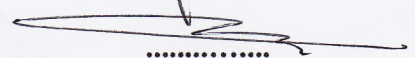
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 - 09 - 2013
Tempat : Ruang dosen G. Aryadi SH. M. Hum
Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M. Hum
Sekretaris : G. Aryadi, SH. M. Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Tanda Tangan :


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum

HALAMAN MOTTO

*Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan.*

Matius 5 : 7

PERSEMBAHAN

Penulis Hukum mempersembahkan Kepada

Tuhan Yesus Kristus

Bapakku Bitner Hutajulu

Mamakku Magdalena Br. Tambunan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia-lah yang selalu memeberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Penulis mengambil tema tentang Integritas karena penulis prihatin terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari semakin kompleks, dan dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pencerahan kepada Pejabat Publik (Aparat Penegak hukum) dan hukum pidana di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. YTH Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS sebagai dosen pembimbing.
3. Kepada dosen-dosen Atma Jaya yang telah memberikan Ilmunya kepada saya.
4. Kepada Staf Tata Usaha dan staff Perpustakaan.
5. Saudara-saudaraku tercinta, terima kasih atas dukungan dan doannya.
6. Teman-teman seperjuanganku Septa, Indra, Eko,Yoan, Berdi, Putu, Lea, sinta, noni,dan teman-teman lain se-Almamater.
7. Teman-teman KKN yang sakti, Gina, Bambang, Depy, Devy, Carla, Erosa, Eka dan Vembiyanto.
8. Teman-teman dari desaku Jayaloka Mas Edi, Yesi, Erwin, Krisna, Teguh, Win, Bayu, yang selalu memberi semangat 99.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat melengkapi kekurangan tersebut. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta 26 Agustus 2013

Mulia Parlindungan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2013

Yang menyatakan

Mulia Parlindungan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN ABSTRACT.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6

F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II INTEGRITAS PUBLIK VERSUS KORUPSI.....	12
A. Korupsi Adalah Melawan Hukum dan Menciderai Hati Rakyat ...	12
1. Pengertian Korupsi.....	13
2. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	34
3. Kekuasaan, Konflik Kepentingan dan Korupsi.....	41
B. Integritas Pejabat Publik dan Aparat Penegak Hukum Suatu	
Keharusan.....	44
1. Pengertian Integritas.....	44
2. Alibi Tanggung jawab dan Pengunduran Diri.....	48
3. Akuntabilitas, Transparansi Menuju Integritas Pejabat Publik..	51
C. Korelasi antara Integritas Pejabat Publik dengan Korupsi.....	72
BAB III PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka.....	76
Lampiran.....	78

ABSTRACT

Enforcing fairness of the law, honest, free of corruption, collusion, and nepotism is impossible without the integrities of public officials and law enforcement officers. Good faith and personal righteousness of them, could not be able to definite the rule of law. There are still a gap between knowing the laws, and implementing of the laws. There is not a reason to corrupt. Corruption could not be justified by the laws, morals, ethics and religions. Corruption is an act that against the law and injure the people's justice.

Corruption, collusion, and nepotism are an attitude of abuse of power. The public officials and law enforcement officers could not do fairness of the law, accountable and transparent, that was couused a rotten of public integrity. Public integrity as part of a public ethics emphasizes reflective dimension, trying and finding how to get a wise to act and to grow quality public services. Public integrity is the result of the habitus which encourages them to direct their interesting for the people and to grow for quality public services, also to prevent so that the attitude of abuse of power can not be happens.

Accountability and transparency are to be functioned as encouragements the transparency of public officials, as well as sharpens in the chain of responsibilities towards the public. Ethics infrastructure, that are internal institution or external institution have function to control the accountabilities and transparencies of themselves. In other words, public integrity will reject all the attitude of corruption. The correlation between the integrity of public officials and law enforcement officers with corruption are always refused, contrasted or opposed. The purpose of all that are fairness, justice and quality public services also to establishment the rule of the law.

Keyword : Corruption, Integrity, Habitus, Public Official.